

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Kemang Raya No.35, Bangka - Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12730

Telp. : 021-71791838, HP/WA: +62 812 83062237

website: www.ibs.ac.id e-mail: p3m@ibs.ac.id

Nomor : 007/P3M-ST-DOS/STIE IBS/III/2024

Jakarta, 21 Maret 2024

Kepada Yth.

Dr. Ir. Hayu Susilo Prabowo, M.Hum.

NIDN: 0314026206

Di Tempat

Perihal: Tugas Melakukan Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menunjuk Surat Undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HAM-HH.01.01-15 dengan ini Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE IBS memberikan tugas dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan : Media Dialogue : Ngabuburit Direktorat Jenderal HAM
Tema : Aspek HAM Dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global
Tugas : Narasumber
Hari/tanggal : Jumat/ 22 Maret 2024
Tempat : The Orient Jakarta
Jl. Jend. Sudirman No.36, Bendungan Hilir,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan, harap dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dosen yang bersangkutan mengirimkan laporan kegiatan tersebut paling lambat seminggu setelah kegiatan berlangsung, semoga yang berkepentingan menjadi maklum.

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL**



Dr. Taufiq Hidayat., M.BankFin., QRMP, CACP
Kepala Bagian P3M



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 2526185 Faksimili : (021) 2526174
Laman : www.ham.go.id

Nomor : HAM-HH.01.01-15
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Narasumber

19 Maret 2024

Yth. Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Majelis Ulama Indonesia
di tempat

Direktorat Jenderal HAM akan menggelar media dialogue dengan tema "Aspek HAM dalam Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global". Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024

Pukul : 16.00 s.d. Selesai

Tempat : The Orient Jakarta, Jalan Sudirman No. 36 Jakarta Pusat

Sehubungan hal tersebut, dengan hormat mohon perkenan Bapak hadir sebagai narasumber pada acara media dialogue. Selepas kegiatan, akan dilaksanakan buka bersama dan ramah tamah dengan rekan-rekan wartawan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Arsy (0896574373880).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal HAM
Sekretaris Direktorat Jenderal HAM

Novita Ilmaris S.Kom., S.H., M.H.
NIP. 19761117 199903 2 001

Tembusan :
Direktur Jenderal HAM

Media Dialog : Ngabuburit

“Aspek HAM dalam Fatwa MUI Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim”

Aktivitas bisnis dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara. Namun, aktivitas bisnis juga dapat berimplikasi pada potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari segala aspek, diantaranya aspek lingkungan hidup. Pada aspek lingkungan, kegiatan operasional pelaku usaha yang tidak mengindahkan regulasi dan kebijakan akan berakibat pada pencemaran lingkungan dan deforestasi yang semua berdampak pada kehidupan manusia di sekitarnya.

Untuk menguatkan komitmen Pemerintah agar Perusahaan memasukkan nilai-nilai HAM dalam operasional usahanya, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang konkret dengan mengundang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 September 2023. Perpres dimaksud menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Bisnis dan HAM di Indonesia karena telah memuat Strategi Nasional (arah kebijakan) Bisnis dan HAM, serta Aksi HAM periode tahun 2023 - 2025. Salah satu aksi Bisnis dan HAM yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024 dan 2025 diantaranya adalah mendorong pelaku usaha menyusun kebijakan internal tentang perlindungan lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10 November 2023 telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa tersebut mengatur bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram. Fatwa tersebut juga memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk menaati ketentuan perizinan (AMDAL) dengan benar dan mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Dapat dikatakan, fatwa ini menjadi salah satu agenda progresif yang patut untuk diapresiasi dan dipahami secara memadai baik oleh pemerintah, publik, maupun pelaku usaha.

Fatwa ini tentu juga patut menjadi perhatian bagi pelaku-pelaku usaha untuk memastikan bahwa operasional usahanya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Terlebih dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, fatwa MUI kerap menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan keputusan sehari-hari. Guna mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka para pelaku usaha nampaknya perlu untuk memperhatikan dengan seksama hal ini.

Dalam momentum bulan Ramadhan, Direktorat Jenderal HAM memandang adanya relevansi untuk mendiskusikan terkait upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal HAM dan Majelis Ulama Indonesia dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup dari aktivitas bisnis. Selain itu, kegiatan ini menjadi peluang kedua instansi untuk menemukan titik temu dalam mendukung upaya perusahaan untuk bertanggung jawab atas penghormatan hak asasi manusia.

RUNDOWN

Media Dialog : Ngabuburit

“Aspek HAM dalam Fatwa MUI Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim”

No	Kegiatan	Estimasi Waktu	PIC
1	Paparan Narasumber	16.15 – 16.30	Moderator
2	Paparan Direktur Jenderal HAM	16.30 – 16.45	Moderator
3	Sesi Tanya Jawab	16.45 – 17.30	Moderator
4	Penutup	17.30 – 18.30	Moderator
5	Ramah Tamah dan Buka Bersama	18.00 – Selesai	Panitia



MAJELIS ULAMA INDONESIA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Aspek HAM dalam Fatwa MUI Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim

Dr. H. M. ...
Ketua Majelis Ulama Indonesia

...

